

Bertambah Polisi yang Dipecat karena Terbukti Langgar Etik di Kasus Brigadir J

JAKARTA (IM) - Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri memutuskan memecat AKBP Jerry Raymond Siagian karena terbukti melanggar etika profesi terkait *obstruction of justice* dalam penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Menurut Kepala Bidang Humas Mabes Polri Kombes Nurul Azizah, putusan itu disampaikan dalam sidang majelis KKEP terhadap Jerry yang dilakukan pada Jumat (9/9) sampai Sabtu (10/9).

"Sanksi etika perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Nurul dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/9).

"Sanksi administratif. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," ujar Nurul menambahkan.

Selain itu, Jerry juga menjalani sanksi berupa penempatan dalam tempat khusus (patus) selama 29 hari, dari 11 Agustus 2022 sampai 9 September 2022 di Rutan Korps Brimob Polri. "Dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar," ucap Nurul.

Sidang KKEP terhadap AKBP Jerry berlangsung 12 jam dan 30 menit, yang dilaksanakan mulai Jumat (9/9) pukul 18.45 WIB dan berakhir pada Sabtu (10/9) pukul 06.00. Sidang etik terhadap Jerry digelar di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung Transnational Crime Center

(TNCC) Mabes Polri.

Nurul mengatakan, terdapat 5 perwira yang menjadi majelis sidang KKEP terhadap Jerry. Mereka adalah Irjen Pol Tornagogo Sihombing (Wakil Inspektorat Pengawasan Umum Polri) sebagai Ketua Komisi KKEP. Lalu Brigjen Pol Agus Wijayanto (Karowabprof/Divpropam Polri) sebagai Wakil Ketua Komisi KKEP.

Sedangkan anggota majelis terdiri dari Kombes Pol Rahmat Sanusi, Kombes Pol Sakeus Ginting, dan Kombes Pol Pitra Andrias Ratulangie. Perwira Polri yang menjadi pelaksana sidang etik AKBP Jerry adalah Kombes Rahmat Pamuji Ketua Komisi sidang KKEP. Kemudian Kombes Sakeus Ginting dan Kombes Pitra Andrias Ratulangie sebagai anggota.

Nurul mengatakan, saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan etik Jerry terdiri dari 13 orang. Menurut paparan Nurul, dalam sidang itu Jerry terbukti melanggar sejumlah pasal. Pasal yang terbukti dilanggar oleh Jerry adalah Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat 1 huruf c, Pasal 6 ayat 1 huruf g, pasal 8 huruf e (1), Pasal 10 ayat 1 huruf f, dan/atau Pasal 11 ayat 1 huruf a Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

"Atas putusan tersebut pelanggar menyatakan banding," ucap Nurul. ● **lus**



FOTO: ANT

SPBU DITUTUP KARENA AKSI UNJUK RASA DI ACEH BARAT

Personel Kepolisian Polres Aceh Barat mengawasi tempat pengisian bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) saat aksi unjuk rasa di Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Senin (12/9). Sebanyak tiga unit SPBU di Kabupaten setempat terpaksa ditutup sementara karena beredar informasi peserta aksi akan melakukan aksi demonstrasi di SPBU.

Polri Masih Tunggu Laporan soal Kebocoran Data oleh Hacker Bjorka

JAKARTA (IM) - Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, hingga kini pihaknya masih menunggu soal laporan kebocoran data pejabat negara yang diduga dilakukan oleh hacker alias peretas Bjorka. "Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) masih menunggu laporan dan monitor," kata Dedi saat dikonfirmasi, Senin (12/9).

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah juga mengatakan hal serupa, bahwa pihaknya belum melakukan langkah apapun

"Enggak ada (tindakan). Silakan langsung ke instansi itu masing-masing ya," ucap Nurul kepada wartawan di Mabes Polri.

Diketahui sebelumnya, Hacker Bjorka mengklaim telah membocorkan lebih dari 679.180.000 dokumen. Data yang berukuran 40 megabyte itu diretas per September 2022. Dalam situsbreached.to, Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019-2021.

Setelah meretas data sejumlah lembaga negara, menteri, kepala institusi hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi), akun Twitter hacker Bjorka @bjorkanism terkena suspensi atau ditanggguhkan oleh pihak Twitter.

Dibantah Pihak Istana

Sementara pihak Istana menepis kabar adanya data Presiden Jokowi (Jokowi) yang di-bobol oleh hacker Bjorka. Istana meyakini bahwa sistem keamanan datanya tidak mudah dimasuki oleh siapa pun.

"Saya yakin nggak

(bocor). Karena kan saya yang tahu, kalau pun bisa meretas paling masuk ke window awal, dan *window* awal itu kan banyak laporan kebocoran data pejabat negara yang diduga dilakukan oleh hacker alias peretas Bjorka. "Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) masih menunggu laporan dan monitor," kata Dedi saat dikonfirmasi, Senin (12/9).

"Kalau pun itu bisa masuk, itu pun yang bisa masuk di daftar isi saja," katanya menambahkan. Terkait kebocoran data, Heru menegaskan bahwa kementerian dan lembaga terkait harus hadir. Karena batasan saat ini bukan hanya berbentuk fisik saja tetapi secara elektronik.

"Saya rasa negara harus hadir, jadi kalau sudah masuk meretas, Negara Republik Indonesia ini kan batasan-batasan itu tidak hanya NKRI, pulau Jawa, batasan wilayah, sekarang kan sudah lebih maju, batasan-batasan secara elektronik juga itu adalah batasan negara republik Indonesia," jelasnya.

Diketahui, akun Dark Tracer memetakan hacker Bjorka yang membocorkan berbagai database kewarganegaraan Indonesia yang sudah dilakukan peretas tersebut sejak 2020, mulai dari membocorkan data 26 juta pelanggan IndiHome, namun Telkom membantahnya.

Terbaru, Bjorka juga mengklaim menjual 105 juta data milik warga negara Indonesia yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bjorka juga berulah dengan mengklaim memiliki 1,3 miliar data registrasi SIM card payabayar Indonesia yang isinya meliputi data NIK, nomor telepon, operator seluler, hingga tanggal registrasi. ● **lus**



LAPORAN KOMNAS HAM:

Telah Terjadi *Extra Judicial Killing* dan *Obstruction Of Justice* di Kasus Brigadir J

Komnas berkesimpulan telah terjadi *extra judicial killing* dan *obstruction of justice* yang dilakukan Ferdj Sambo terhadap Brigadir Joshua.

JAKARTA (IM) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan telah terjadi *extra judicial killing* dan *obstruction of justice* dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabara atau Brigadir J (Yoshua).

Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM, Ahmad

Taufan Damanik saat memberikan laporan ke Presiden RI yang diwakili oleh Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam RI Jakarta pada Senin (12/9). "Hari ini saya memenuhi undangan dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Melaporkan hasil-tugas konstitusionalnya," ujar Taufan Damanik.

Sesuai dengan UU Nomor 39 tahun 1999 untuk isu-isu kasus hak asasi manusia tertentu yang diselidiki oleh Komnas HAM ada kewajiban pihaknya menyerahkan laporan kepada Presiden RI yang diwakili Menkopolhukam dan DPR RI.

Laporan tersebut kata Taufan juga telah bekerja sama dengan Komnas Perempuan.

"Dari seluruh penelusuran investigasi, pengumpulan fakta, data, meminta keterangan dari beberapa waktu terakhir kami berkesimpulan telah terjadi *extra*

Judicial Killing yang dilakukan oleh saudara FS terhadap almarhum Brigadir Joshua," ujar Taufan Damanik.

Taufan menyebutkan telah terjadi penghalangan penyelidikan kasus sesuai koridor hukum yang berlaku karena adanya oknum anggota Polri

yang melakukan pelanggaran kode etik terkait penyidikan kasus tersebut. "Telah terjadi secara sistematis apa yang kita sebut sebagai *obstruction of justice* yang saat ini ditangani penyidik dan timsus Polri," ungkapnya. ● **lus**

yang melakukan pelanggaran kode etik terkait penyidikan kasus tersebut.

"Telah terjadi secara sistematis apa yang kita sebut sebagai *obstruction of justice* yang saat ini ditangani penyidik dan timsus Polri," ungkapnya. ● **lus**

6.142 Personel Polisi Diterjunkan Amankan Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM oleh PA 212

JAKARTA (IM) - Aksi menolak kenaikan harga BBM kembali terjadi hari ini. Untuk itu, Polisi menurunkan sebanyak 6.142 personel kepolisian untuk menjaga dan mengawal pelaksanaan aksi demonstrasi penolakan kenaikan BBM, Senin (12/9).

"Kemudian untuk kekuatan pasukan yang diturunkan 6.142 personel," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan, Senin (12/9).

Personel ini dikerahkan dan dibagi kedalam tiga titik yang menjadi lokasi aksi demonstrasi yakni, Patung Kuda, Gedung DPR-MPR, dan Balai Kota DKI Jakarta.

"Jadi untuk besok kegiatan unjuk rasa, demo itu ada di tiga titik. Iya di tiga titik jadi dibagi, konsentrasi utamanya itu di patung kuda dan di MPR-DPR," katanya.

Pihaknya pun menghimbau agar masyarakat dapat berhati-hati dan memantau perkembangan yang akan terus di update di media sosial untuk pengalihan arus kendaraan.

"Kemudian ini dalam demo kali ini saya imbau kepada masyarakat dimungkinkan adanya pengalihan arus lalu lintas demo ini. Pengalihan arus lalu lintas itu di tiga titik itu," tegasnya.

Sebelumnya, PA 212 bersama sejumlah ormas lainnya berencana menggelar demo di Istana Negara terkait kenaikan harga BBM. Nantinya, polisi akan menutup sejumlah ruas jalan untuk mengantisipasi aksi tersebut.

"Mulai pukul 11.00 WIB Jl Merdeka Barat dan Harmoni akan ditutup," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Usman Latif melalui pesan singkat, Minggu (11/9).

Rekayasa Lalun

Kepolisian menyiapkan skema rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

Kanit Lantas Polsek Tanah Abang AKP Efo Rudy mengatakan, rekayasa lalu lintas dilakukan bila peserta unjuk rasa memadati ruas jalan depan Gedung DPR RI, tepatnya Jalan Gatot Subroto. Adapun rekayasa lalu lintas akan diberlakukan di bawah jalan layang Landogi.

"Di sekat dua (ruas jalan di) *underpass* Landogi,

nanti apabila ini tidak bisa dilintasi untuk kendaraan, kami akan alihkan ke kiri ke arah Hotel Mulya, nanti kami akan belokan ke kiri lagi," kata Rudy saat ditemui di depan Gedung DPR RI.

Kemudian, bagi pengendara dari Hotel Mulya ke arah Gedung DPR RI, kata Rudy, pihaknya akan mengatahkan untuk putar balik. "Itu SOP yang kami lakukan untuk supaya tidak masyarakat terjebak," tutur Rudy.

Rudy mengungkapkan pemberlakuan rekayasa lalu lintas itu melihat situasi dan kondisi aksi unjuk rasa. Baginya, penerapan itu ditujukan agar masyarakat nyaman melintas Gedung DPR RI.

"Jadi prioritas kami adalah tetap bisa dilalui masyarakat. Untuk peserta aksi unjuk rasa kami kanalisasi di dalam sini, itu prioritas kami," ujar Rudy.

Rudy menambahkan, setidaknya ada 80 petugas lalu lintas yang telah disiagakan untuk mengantisipasi unjuk rasa di DPR RI. Puluhan petugas itu tersebar di sejumlah titik.

"Untuk hari ini, lalu lintas kami sebar semua, baik dari Manggala, DPR, Asia Afrika, seterusnya sampai dengan *underpass* Landogi. Untuk lalu lintas ini kami libatkan 80 persnel tersebar di seluruh titik ujung untuk mengantisipasi supaya lalu lintas yang ke arah Slipi tidak alami hambatan," terang Rudy.

Seperti diketahui, Gedung DPR RI telah dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Penjagaan dilakukan guna mengantisipasi aksi unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga BBM.

Dari pantauan di lapangan, sejumlah kendaraan taktis (rantis) disiagakan di depan gerbang utama Gedung DPR RI.

Sementara itu, belum terlihat pengunjuk rasa yang datang di Gedung DPR RI. Dari informasi yang diterima, setidaknya ada tiga kelompok yang akan berunjuk rasa di DPR RI. Ketiga kelompok itu ialah BEM Universitas Azzahra, Pergerakan Aktivistis Nusantara, dan Poros Baru Batavia Memanggil. ● **lus**

Kapolri: Ikan Busuk Mulai dari Kepala, Anak Buah Ingatkan Komandan yang Salah Sah-sah Saja

JAKARTA (IM) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memanti-wanti jajarannya untuk saling mengingatkan. Dia tidak ingin personel Polri hanya diam dan takut menyampaikan pendapat ketika menemukan hal-hal yang tidak sepatutnya.

"Ikan busuk tentunya mulai dari kepala. Mari kita saling mengingatkan," kata Listyo dalam tayangan video Divisi Humas Polri, Senin (12/9).

"Atasan mengingatkan anak buah, anak buah juga sama, menyampaikan komandan seperti ini salah, dan itu sah saja," tuturnya.

Listyo pun memanti-wanti seluruh anggota Polri untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran, khususnya terhadap hal-hal yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat. Dia mengancam akan langsung mencopot jajarannya yang kedapatan melakukan pelanggaran.

"Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya copot. Ini berlaku untuk semuanya, apakah itu polki (polisi la-

ki-laki) apakah itu polwan (polisi wanita)," ujarnya.

Jenderal Listyo menyinggung soal perjudian dan penyakit masyarakat lainnya. Ia mengatakan, Indonesia sedang pusing dan bebannya cukup berat karena kejahatan-kejahatan kekayaan negara. Oleh karenanya, dia meminta para personel Polri menindak tegas kejahatan-kejahatan ini, bukan malah melakukan pelanggaran.

"Kalau itu kita lakukan, maka itu akan semakin menurunkan kepercayaan publik kepada Polri," ucap Sigit. Sigit melanjutkan, dirinya terus mengingatkan telah bekerja dengan baik dan 30.000 PNS yang juga bekerja dengan baik," kata jenderal bintang empat Polri itu.

Listyo menegaskan dirinya tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran yang dilakukan personel Polri. Jika bawahan mendapat perintah yang salah dari ko-

mandan, kata Kapolri, maka harus berani menyampaikan pendapat karena ini untuk kebaikan institusi.

Dalam unggahannya Listyo uga menambahkan video singkat, yang didalamnya menampilkan dirinya memanti-wanti seluruh jajarannya agar menghindari pelanggaran.

"Saya selalu memanti-wanti agar seluruh personel Polri menghindari pelanggaran khususnya terhadap hal yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat," ujarnya.

Ia meminta agar seluruh anggota Polri dapat mengingatkan satu sama lain dalam menjaga marwah kepolisian. Ia menyinggung soal soal perintah atasan. Menurutnya, bawahan tidak perlu takut menegur atasan jika ada perintah yang salah.

"Mari kita saling mengingatkan, atasan selalu mengingatkan bawahan, begitu pula jika bawahan mendapat perintah yang salah dari komandan maka harus berani menyampaikan pendapat karena ini semua untuk kebaikan institusi," ucapnya. ● **lus**



FOTO: IM/FRANS

KASUS PENCURIAN BRANKAS MILIK SELEBGRAM DARA ARAFAH

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan (duduk, tengah) memberikan keterangan pers kasus pencurian brankas di rumah selebgram Dara Arafah, di Polda Metro Jaya, Senin (12/9). Kombes Pol E Zulpan menyampaikan Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya menangkap ART (asisten rumah tangga) M (52) pelaku pencurian brankas milik selebgram Dara Arafah. Petugas juga menangkap satu pelaku lainnya berinisial S(35).